



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telepon (0411) 590591, Faksimile (0411) 590595,
Email sulsel@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Krisdiyanto
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ardan Adiperdana

NIP 19590616 197911 1 001

Jakarta, 16 Januari 2017
Pihak Pertama,

Didik Krisdiyanto

NIP 19610913 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55
		1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55
2.	Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40
		2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70
		2.3 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
3.	Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	70
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50
5.	Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60
6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)	%	100
		6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	42
		6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	25
		6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33
		6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	0
		6.6 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	0
		6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	16,67
		6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	60
7.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	37,5
		7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
		7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	41,67
		7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)	%	20,83
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	168
2.	Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP	2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	32

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
		2.2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	30
3.	Terlaksananya bimtek dan penilaian kapabilitas APIP	3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	20
		3.2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	20
B.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1.	Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	7
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12
2.	Termanfaatkannya aset secara optimal	2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	M2	800

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp. 2.146.761.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp. 26.660.172.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp. 845.861.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp. 859.000.000,00
Jumlah	Rp. 30.511.794.000,00



**PERJANJIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
				Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1		2	3	4	5	6	7	8
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program						
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	1,25	17,75	5,5	30,5	55
		1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	0	0	0	55	55
2.	Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	0	0	0	40	40
		2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	0	0	0	70	70
		2.3 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	0	70	70
3.	Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	0	0	0	70	70
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	0	0	0	50	50
5.	Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	0	0	0	60	60
6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)	%	0	0	100	0	100
		6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	4	0	13	25	42
		6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	25	0	0	0	25
		6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33	0	0	0	33
		6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	0	0	0	0	0
		6.6 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)	%	0	0	0	0	0
		6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	0	12,5	4,17	0	16,67
		6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	0	0	60	0	60
7.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	12,50	12,50	8,00	4,50	37,50
		3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	0	0	0	100	100
		3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	12,50	8,33	12,50	8,34	41,67
		3.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)	%	0	0,00	12,50	8,33	20,83

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan						
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	3	51	20	94	168
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP	2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	0	0	17	15	32
	2.2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	0	0	17	13	30
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP	3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	0	0	7	13	20
	3.2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	0	0	7	13	20
B. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program						
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	0	0	0	7	7
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan						
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencari keuasaan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	3	3	3	3	12
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	M2	0	280	520	0	800
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP		Rp	220.000.000	791.000.000	554.000.000	581.761.000	2.146.761.000
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP		Rp	5.175.000.000	7.034.000.000	7.336.000.000	7.115.172.000	26.660.172.000
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP		Rp	190.600.000	419.000.000	146.000.000	90.261.000	845.861.000
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana		Rp	-	642.000.000	217.000.000	-	859.000.000
	Jumlah	Rp	5.585.600.000	8.886.000.000	8.253.000.000	7.787.194.000	30.511.794.000

